

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si | Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes | Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP
Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb. | Yuseva Sariati, M.Keb
Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th | Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP
Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep |Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.



PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN BUDAYA PATRIARKI



PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN BUDAYA PATRIARKI

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP
Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.
Yuseva Sariati, M.Keb
Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP
Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep
Dr. Anđi Yusniar Mendo, S.E., M.M.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202382099, 17 September 2023
Pencipta	
Nama	: Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si, Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si dkk
Alamat	: Jalan Martanda Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari , Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si, Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si dkk
Alamat	: Jalan Martanda Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari , Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN BUDAYA PATRIARKI
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 17 September 2023, di Surakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000515052

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer

Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan sumpah pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	Jalan Martandu Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari
2	Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau
3	Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes	Jl. MT. Haryono Perum. Bukit Mediterania Cluster Greece D6/2A, Samarinda Ulu, Kota Samarinda
4	Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP	Tanjung, RT 02/RW 05, Tanjung, Juwiring, Klaten
5	Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.	Sukadadi, RT.002/ RW.001, Kel/DesaS Ukadadi, Kec. Gedong Tataan, Kab./Kota Pesawaran, Lampung
6	Yuseva Sariati, M.Keb	Taman Cibaduyut Indah Blok L/ 61 Cangkung Wetan- Dayeuhkolot - Kab. Bandung
7	Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th	Jl. Pulo Besar I No. 23, RT/RW 005/011, Kel/Desa Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
8	Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP	Manggisjan 03/09 Kartasura Sukoharjo
9	Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep	Gg.Damai 3, Jatiwaringin Pondok Gede Kos Assyifa, Pondok Gede, Kota Bekasi
10	Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.	Jl Gelatik No.16A Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	Jalan Martandu Lrg. Kharisma I RT 001/ RW 001 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari
2	Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau
3	Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes	Jl. MT. Haryono Perum. Bukit Mediterania Cluster Greece D6/2A, Samarinda Ulu, Kota Samarinda
4	Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP	Tanjung, RT 02/RW 05, Tanjung, Juwiring, Klaten
5	Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.	Sukadadi, RT.002/ RW.001, Kel/DesaS Ukadadi, Kec. Gedong Tataan, Kab./Kota Pesawaran, Lampung
6	Yuseva Sariati, M.Keb	Taman Cibaduyut Indah Blok L/ 61 Cangkung Wetan- Dayeuhkolot - Kab. Bandung
7	Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th	Jl. Pulo Besar I No. 23, RT/RW 005/011, Kel/Desa Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
8	Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP	Manggisjan 03/09 Kartasura Sukoharjo
9	Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep	Gg.Damai 3, Jatiwaringin Pondok Gede Kos Assyifa, Pondok Gede, Kota Bekasi
10	Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.	Jl Gelatik No.16A Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo



PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN BUDAYA PATRIARKI

Penulis:

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP
Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.
Yuseva Sariati, M.Keb
Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP
Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep
Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xi, 191, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-151-2

Cetakan Pertama:
September 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki” terdiri dari 10 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Bab 1 Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat

Bab 2 Diskriminasi Perempuan

Bab 3 Budaya Patriarki Di Indonesia

Bab 4 Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki

Bab 5 Perlawanan Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki

Bab 6 Peran Perempuan terhadap realisasi Pembangunan SDG's

Bab 7 Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik

Bab 8 Akses Perempuan Dibidang Pendidikan

Bab 9 Akses Perempuan Dalam Bidang Kesehatan

Bab 10 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Perempuan Di Indonesia

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat	
Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si	
Universitas Lakidende	
A. Pendahuluan	2
B. Konsep Peran Perempuan	3
C. Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat	4
D. Peran Perempuan Dalam Bidang Sosial Budaya	6
E. Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional.....	7
F. Peran Perempuan Dalam Bidang Pendidikan	8
G. Peran Perempuan Dalam Bidang Politik.....	10
H. Peran Perempuan Dalam Sektor Publik	11
I. Peran Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Keluarga	12
J. Peran Perempuan Dalam Bidang Agama	14
K. Peran Perempuan Dalam Bidang UMKM	15
L. Peran Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga	17
M. Peran Perempuan Sebagai Istri Suami Dalam Keluarga	19
N. Peran Perempuan Dalam Bidang Pembangunan.....	21
O. Penutup	23
Daftar Pustaka	25
Profil Penulis	27
Bab 2 Diskriminasi Perempuan	
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si	
Universitas Riau	
A. Pendahuluan	30
B. Diskriminasi Perempuan	35
Daftar Pustaka	46
Profil Penulis	47

Bab 3 Budaya Patriarki Di Indonesia

Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes

STIKES Dirgahayu Samarinda

A. Pendahuluan.....	49
B. Pengertian Patriarki.....	50
C. Jenis Patriarki.....	52
D. Sistem Patriarki.....	52
E. Peran Gender Dalam Budaya Patriarki	53
F. Budaya Patriarki.....	57
G. Sexualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarki.....	59
H. Sistem Sosial Budaya Patriarki	59
I. Peran Pekerja Sosial Menghadapi Dampak Budaya Patriarki	63
J. Kritik Feminisme dan Gender Terhadap Tatanan Patriarki	64
K. Perubahan Peran Gender Dalam Budaya Patriarki	65
Daftar Pustaka	68
Profil Penulis	70

Bab 4 Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

A. Perempuan dan Patriarki	72
B. Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki	73
Daftar Pustaka	82
Profil Penulis	83

Bab 5 Perlawanan Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki

Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Universitas Aisyah Pringsewu Lampung

A. Pendahuluan.....	85
B. Dominasi Patriarki	85
C. Persepsi Laki – Laki Terhadap Dominasi Patriarki	86
D. Persepsi Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki	88
E. Dasar Perlawanan.....	89
F. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	91
G. Bentuk – Bentuk Dominasi Patriarki	92
H. Pertentangan Internal	94
I. Partisipasi Perempuan.....	96

J. Tingkat Kesadaran Perempuan	97
K. Penerapan Neuro Linguistic Programming (NLP) Pada Perlawanan Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki	98
L. Tantangan dan Hambatan Dalam Perlawanan Serta Cara Penanggulangannya	101
M. Ancaman dan Kekerasan Terhadap Aktivistis Perempuan Serta Cara Penanggulangannya	103
N. Harmonisasi Peran Perempuan dan Laki – Laki Dalam Kesetaraan Gender.....	106
O. Strategi Pendekatan Memanusiakan Manusia Antara Perempuan dan Laki – Laki	108
Daftar Pustaka	111
Profil Penulis	114
Bab 6 Peran Perempuan terhadap realisasi Pembangunan SDG’s	
Yuseva Sariati, M.Keb	
Universitas Brawijaya	
A. Pendahuluan.....	116
B. Relevansi Pluralisme Dan Multikulturalisme Terhadap Pembangunan Berkelanjutan	119
C. Peran Perempuan Dalam Mengimplementasikan Tujuan Utama Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).....	121
D. Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Pada Perempuan Dan Anak Perempuan.....	122
Daftar Pustaka	129
Profil Penulis	131
Bab 7 Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik	
Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th	
STT Ekumene Jakarta	
A. Pendahuluan.....	133
B. Kepemimpinan Perempuan	134
C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan	137
D. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat.....	139
E. Kepemimpinan Perempuan Dibidang Pemerintahan	140
F. Kepemimpinan Perempuan Indonesia Di Masa Depan	142

G. Kesimpulan	145
Daftar Pustaka	147
Profil Penulis	150
Bab 8 Akses Perempuan Dibidang Pendidikan	
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP	
Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS)	
Ungaran Semarang	
A. Pendahuluan.....	152
B. Peran Perempuan Dalam Pendidikan.....	154
C. Akses Perempuan Menempuh Pendidikan.....	156
D. Sosok Perempuan Hebat di Dunia Pendidikan.....	166
Daftar Pustaka	169
Profil Penulis	170
Bab 9 Akses Perempuan Dalam Bidang Kesehatan	
Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep	
Universitas Indonesia	
A. Pendahuluan.....	172
B. Pengertian Perempuan dan Kesehatan	173
C. Pihak Yang Berperan Penting Dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan.....	173
D. Ruang Lingkup Peran Perempuan Di Bidang Kesehatan	174
E. Potensi peran Perempuan Di Dunia Kesehatan.....	178
Daftar Pustaka	179
Profil Penulis	180
Bab 10 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Perempuan Di Indonesia	
Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.	
Universitas Negeri Gorontalo	
A. Pendahuluan.....	182
B. Sejarah Pergerakan Perempuan.....	182
C. Permasalahan Gender.....	183
D. Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Perannya Dalam Keluarga.....	184
E. Tantangan Untuk Perempuan.....	185
F. Peluang Untuk Perempuan.....	187
G. Langkah Yang Perlu Dilakukan Untuk Perempuan.....	188

Daftar Pustaka	190
Profil Penulis	191



BAB 1

PERAN-PERAN

PEREMPUAN

DALAM

MASYARAKAT

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si
Universitas Lakidende

A. PENDAHULUAN

Kontribusi dan kemajuan dalam suatu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sejak dahulu sampai era modern sekarang ini hanya ada dua pemeran utamanya yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin inilah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan masyarakat maju dan masyarakat yang sejahtera. Tentu saja peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu hingga era modern saat ini masih menjadi perdebatan publik yakni setara atau tidak setara dengan laki-laki, artinya peran laki-laki dan perempuan masih sering menjadi bahan diskusi dalam meninjau peran perempuan dalam kehidupan Masyarakat. Namun kondisi perempuan saat ini juga telah memiliki kesempatan sama untuk berkontribusi dalam masyarakat, dalam pembangunan dan untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjadi tenaga untuk menambah pendapatan keluarga.

Secara faktual peran perempuan dalam masyarakat masih nampak pada dua peran utama yaitu peran secara internal atau domestik dalam rumah tangga dan peran secara eksternal atau peran pada sektor publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki dua peran yang harus dilaksanakan setiap hari sebagai sebuah rutinitas demi kemajuan kehidupan rumah tangga.

Peran ganda perempuan ditunjukkan pada peran domestik, yakni menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, dan peran pada sektor publik, yakni menyangkut karir profesional dalam masyarakat atau di luar rumah. Kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya. Kesempatan perempuan untuk maju dan menempatkan diri setara dengan pria tidak mudah karena adanya berbagai hambatan seperti hambatan biologis, kodrat untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak, sosial budaya memandang perempuan makhluk pasif, lemah, bergantung psikis, ekonomis pada laki-laki dan hambatan teologis (Djarkasi, 2010).

Secara faktual eksistensi perempuan sejak jaman penjajahan sampai era sekarang ini belum terdapat kesetaraan, namun jika dilihat dari berbagai aktivitas para tokoh perempuan yang tercatat dalam sejarah baik dalam negeri

maupun luar negeri pada dasarnya telah banyak kontribusinya dalam masyarakat, bangsa dan negara baik bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun politik dan lain sebagainya. Perempuan telah berkontribusi dan berperan dalam masyarakat, bangsa dan negara sejak di era kolonialisme, orde lama, orde baru era reformasi, globalisasi era industri 4.0. Karena itu, pada bagian bab ini penulis dapat memaparkan peran-peran perempuan dalam masyarakat ditinjau dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

B. KONSEP PERAN PEREMPUAN

Teori sosial Parson dalam Ahdiah (2013) bahwa peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Menurut Salfa (2022) bahwa peran sosial menurut pengertian teori peran didefinisikan sebagai serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Pembagian pekerjaan: pembagian tugas spesifik dalam suatu sistem ekonomi atau organisasi yang diberikan kepada seorang individu sesuai dengan kapabilitas spesialisasi individu tersebut.

Aida Vitalaya (2010) dalam Ahdiah (2013) menjelaskan secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut: (1) peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu. (2) peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.

Teori peran sosial sebagai akar dari relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik yang mengakibatkan terciptanya fungsi struktural gender di dalam lingkup keluarga yang diturunkan kepada peran struktural di masyarakat (Mead dalam Salfa, 2022). Peran adalah suatu bentuk tingkah laku yang dimiliki seseorang yang menduduki kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (Zezen, 2019; dalam Aeni, 2021). Peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dibedakan secara sederhana berdasarkan konstruksi sosial. Ada dua teori yang diterapkan yaitu teori *nature*

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nurul (2021), Peran Perempuan Dalam Pendidikan Anak Dimasa Pandemi Covid-19, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 2 (2021), 01-20, doi: 10.20414/qawwam.v15i2.3582, <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>.
- Ahdiah, Indah, (2013), Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat, *Jurnal Academica Fisip Untad* 5(2), 1085-1092
- Aprianti, Yesi & Yunita, Melda, (2023) Peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20 (1, 39-45.
- Ariyani (2022) Sitya Giona Nur Alam, Milenial Ideal Memimpin Kendari, <https://kendarinews.com/2022/08/26/sitya-giona-nur-alam-milenial-ideal-memimpin-kendari/>, (Diakses: 25/8/2023)
- Bayumi, Muhamad Rahman., Jaya, Rizal Alfit & Shalihah, Bunga Maratush, (2022) Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia, *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2 (2), 115-128.
- Djarkasi, Agnes S. (2010), Kemitrasejajaran Gender: Pria dan perempuan dalam pembangunan, *Jurnal Akrab*, 1 (4), 32-38
- Girsang, Lasmery RM, (2020), Peran Perempuan Dalam Komunitas Melalui Kajian Teori Sosiologis Feminis, *Jurnal Ikon*, 24 (1), 1-15.
- Hasugian, Fenny Monica A. & Panggabean, Lenny, (2019) Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Inada Vol. 2 No. 2, Desember 2019*, 111-135
- Indarti, Sri Henny, (2019), Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat, *IJPA-The Indonesian of Journal Public Administration*, Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019, 1-12
- Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, (2016), *Kajian Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumahan*, , PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan, Jakarta: Center For System, 1-44

- Khaerani, Nalis Siti, (2017) Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya, *Sosietas*, 7 (1), 371-375.
- Lestari, Puji (2011) Peranan Dan Status Perempuan Dalam Sistem Sosial, *Dimensia*, 5 (1), 45 -60
- Prantiasih, Arbaiyah (2014) Reposisi Peran Dan Fungsi Perempuan (2014) *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 1, Pebruari 2014.
- Rumbekwan, Margaretha & Tanamal, Nini Adelina, (2022), Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Volume 48, No. 2, November 2022: 203-212, DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3081
- Salfa, Halida Nabilla, (2022) Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024, *Politica*, Vol. 13 No. 2 Nov 2022, 162-181, doi: 10.22212/jp.v13i2.3163.
- Ulfianna, Vinna; Hermanita, Zuardi, Hanafi & Susanti, Liana Dewi, (2021). Peran Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Kenangadi Kampung Sukajawa Lampung Tengah), *JSGA*, 03 (01), 41-65.

PROFIL PENULIS



Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si, Lahir, 14 Juni 1970, di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara, anak ke-5 dari 8 bersaudara dari Pasangan Suami Istri Kasman D. dan Nahe. Agama Islam, Menikah dengan Sartin, S.I.K., Telah dikaruniai dua orang Putra-Putri masing-masing Nur Rachmatiya Rosa Zahra, S.S. dan Ari Nurfauzan Mubarak. Menamatkan Pendidikan SD Negeri Pamandati (1983), SMP Negeri Pamandati (1986), SPG Negeri Kendari (1989). Mengikuti Pendidikan pada Program Studi S1 PMP dan KN, FKIP Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tamat (1996) sebagai lulusan terbaik satu. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana UHO Tamat Maret (2012) sebagai wisudawan terbaik (*cum laude*). Tahun 2013 mengikuti Program Doktor Ilmu Manajemen (konsentrasi Administrasi Publik) pada Universitas Halu Oleo Tamat Desember (2016) sebagai wisudawan terbaik (*cum laude*).

Karir penulis sebagai Dosen Tetap Yayasan Lakidende Razak Porosi sejak tahun 2009 dan aktif mengajar pada Universitas Lakidende (UNILAKI) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) tahun (2018-2020) dan tahun 2022-sekarang), Anggota Senat UNILAKI Tahun 2018-2020 dan tahun 2022-sekarang, Tim Kerja Unit FIA- LPM UNILAKI tahun 2017-2018. Wakil Ketua II (2019-2022) pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia (*Indonesian Association for Public Administration*) Wilayah Sulawesi Tenggara.

Penulis menjadi Reviewer pada Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik (Publica) Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Sejak tahun 2017-2023, Penulis sering menjadi Narasumber dalam kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan dan UMKM bagi pelaku wirausaha pemula pada masyarakat di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Menjadi narasumber pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan pada Pelaku UMKM di Kabupaten Konawe Selatan mulai 2020-2023. Menjadi

narasumber dalam sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal IKA, dan NKRI) yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis sering menulis opini pada koran Kendari Pos dan aktif menulis jurnal nasional dan jurnal internasional. Penulis aktif dalam kegiatan webinar/seminar nasional dan internasional. Aktif menulis *Book Chapter*: Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (2022), Ilmu Administrasi Bisnis (2023), Kepemimpinan Di Sekolah (2023), Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan Konsep (2023), Transformasi Pendidikan Abad ke-21 (2023), Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Aspek (2023), Perempuan, Masyarakat dan Budaya Patriarki (2023).

BAB 2

DISKRIMINASI

PEREMPUAN

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Universitas Riau



A. PENDAHULUAN

Persoalan Perempuan, Masyarakat dan Budaya Patriarki merupakan persoalan yang terkait dalam administrasi negara atau administrasi publik. Administrasi publik adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dilaksanakan pemerintah dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik. Gerald E. Caiden (1984) mengatakan bahwa Administrasi publik meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah; termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan serta kegiatan dan lembaga militer.

Administrasi publik memiliki sifat pelayanan yaitu memberikan pelayanan (service) yang sama kepada seluruh masyarakat. Artinya dalam melayani masyarakat maka pemerintah tidak boleh melaksanakan pelayanan yang diskriminatif. Hal ini juga berlaku pada pelayanan terhadap perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga dalam pelayanan publik maka tidak boleh dilakukan pelayanan yang diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan publik juga harus dibuat tidak diskriminatif terhadap gender. Karena sampai saat ini diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi dalam praktek-praktek yang terjadi di ranah publik dan ruang publik.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996 : 3) kebijakan publik lebih dekat kepada administrasi negara. Golembiewski menegaskan kebijakan publik merupakan kajian yang semakin penting dalam administrasi negara serta menandai fase perkembangan yang paling mutakhir. Gerald E. Caiden lebih menegaskan lagi bahwa kebijaksanaan publik adalah produk administrasi negara sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat dan demi kepentingan pemerintah. (Ginanjar Kartasasmita, 1996 : 4)

Kebijakan publik menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Senada dengan Jenkins yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu (dalam Wahab, 1997 : 20). Hal ini dijelaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab, 1997 : 3)

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan yang berkaitan tentang persoalan Perempuan, Masyarakat dan Budaya Patriarki banyak diantaranya Kebijakan Pemerintah melalui Intruksi Presiden/ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini juga dibuat dalam upaya pencegahan dan penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kebijakan Pemerintah melalui Intruksi Presiden/ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang sangat penting dan cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk maju dan berkembang, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan melaksanakan pemerintahan atau memerintah secara efektif dan efisien. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari semakin tinggi apresiasi terhadap dimensi gender maka akan semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya jika rendah apresiasi terhadap dimensi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan serta mengalami hambatan dalam melaksanakan pemerintahan atau memerintah secara efektif dan efisien.

Kebijakan yang berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dilakukan pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional yang terkait dengan hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Amanah Konstitusi Negara Indonesia. Adapun kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender antara lain adalah : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang merupakan kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan); Kemudian Beijing Platform of Action, yakni teridentifikasinya ada 12 bidang yang harus diperhatikan dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yaitu antara lain adalah : kemiskinan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, pengambilan keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, (2023), Pengertian Diskriminasi : Penyebab dan Jenis-jenisnya., diakses tahun 2023 : <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/>
- Caiden, Gerald E. (1984), Public Administration, Palisades Publishers, California
- Israpil, (2017), Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017 diakses tahun 2023 : <file:///C:/Users/User/Downloads/176-Article%20Text-272-1-10-20190104.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2007) , Balai Pustaka, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, (1995), Masalah Kebijakan dalam Pembangunan, STIA-LAN RI, Jakarta.
- Lulu, (2021), The 1995 Beijing Platform, Sebuah Deklarasi dalam Upaya Memastikan Kesetaraan gender, diakses tahun 2023 : <https://womentourism.id/id/content/36-the-1995-beijing-platfrom-sebuah-deklarasi-dalam-upaya-memastikan-kesetaraan-gender>
- Saadiyah, Halimah, (2021), 6 Diskriminasi yang Sering Dialami Perempuan di Indonesia, Gen News, diakses tahun 2023 : <https://gensindo.sindonews.com/read/356296/700/6-diskriminasi-yang-sering-dialami-perempuan-di-indonesia-1615014208>
- Seftian, Kevin, (2021), Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya, diakses tahun 2023 : <https://womenlead.magdalene.co/2021/03/17/diskriminasi-gender-di-tempat-kerja/>
- Solichin, Abdul Wahab, (1997), Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si. lahir di Medan, 12 Agustus 1973 dari pasangan Ayahnya yang bernama H. Djunusin Harahap, BA dan Ibunya yang bernama Hj. Nurmiah Siregar. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Riau pada program studi Administrasi Publik. Gelar S.Sos. diperoleh dari Universitas Riau (1997), gelar M.Si. diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau (2004), dan gelar Dr. diperoleh dari Program Doktor Ilmu Administasi Universitas Brawijaya (2011). Pernah menempuh Sandwich Like Program di La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (2009). Penulis beberapa buku serta penulis diberbagai media nasional. Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Seminar Internasional. Pengurus Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Sekretaris Tim Penyusun Proposal Komite Pemrakarsa Pembentukan LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi), Ketua Dewan Pertimbangan pada Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Ketua DPW Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia (AKAPI) Propinsi Riau serta organisasi lainnya. Email : lenka.malika2012@gmail.com

BAB 3

BUDAYA

PATRIARKI DI

INDONESIA

Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes
STIKES Dirgahayu Samarinda



A. PENDAHULUAN

Perbedaan Jenis kelamin merupakan suatu perbedaan yang fitrah dan dapat dilihat secara biologis. Melalui proses yang panjang masyarakat melakukan pembedaan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Selama ini masih banyak orang yang salah dalam memahami kedudukan kaum perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah tugas reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestik (kerumahtanggaan). Perempuan juga dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan dan selalu menggunakan perasaan dan pemikiran yang tidak logis, sehingga tidak layak untuk bekerja di sektor publik. Sementara itu, laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif, sebagai pencari nafkah di ruang publik. Sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu, laki-laki juga bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki menyandang status sebagai bapak di dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai penguasa di dalam keluarga.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan, pendidikan, pengambilan keputusan, bergabung dalam politik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terjadi ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat kita terhadap laki-laki dan perempuan. Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka.

Masyarakat Indonesia secara kultural masih sangat kental dengan budaya patriarki. Patriarki merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam ilmu antropologi. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, distribusi kekuasaan laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan dalam satu aspek atau lebih seperti; penentuan garis keturunan (*patrilineal eksklusif* dan membawa nama belakang), hak-hak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik serta politik (Israpil, 2017).

Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, dimana bapak menjadi penguasa, yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua di dalam keluarga. Oleh sebab itu, sistem hidup dan budaya di dalam keluarga juga membentuk pola kekuasaan dimana bapak adalah penguasanya. Budaya yang populer sebagai budaya patriarki ini tidak berhenti hanya di dalam keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara (Palulungan, 2020).

Praktik Budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, meskipun berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan terus digalakkan. Hal ini nampak pada aktivitas domestik, ekonomi, politik serta budaya, sehingga menyebabkan berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan.

B. PENGERTIAN PATRIARKI

Beberapa pengertian patriarki, antara lain;

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluarga yang mementingkan garis keturunan bapak.
2. Rokhmansyah (2013); menyatakan bahwa patriarki berasal dari kata patriarkat; berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi sampai ke berbagai aspek kegiatan manusia.
3. Menurut Fromm (dalam Adji dkk 2009) Patriarki adalah sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur wanita. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia.
4. Pendapat Fromm ini kemudian diperjelas oleh pendapat Walby (2014) seorang Profesor Sosiologi dan Direktur *Violence and Society Center* di *City, University of London*, yang menyatakan bahwa; patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fujiati, D., (2016). *Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Muwazah jurnal. Vol. 8, No.1;26-47. ISSN 2085-8353. Sumber dari Jurnal satu penulis.
- Halizah, L. R., Faralita, E. (2023). *Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Jurnal Wasaka Hukum. Volume 11 Nomor 1:19-32. p-ISSN 2337-4667. Sumber dari Jurnal dua penulis.
- Handayani, T dan Sugiarti. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Universitas Muhammadiyah, Malang. Sumber dari Buku dua penulis
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan.>
- Israpil. (2017). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. Jurnal Pusaka, Volume.5, Nomor. 2:141-150. Sumber dari Jurnal satu penulis.
- KBBI. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>. Diakses tanggal 3 Juli 2023.
- Komnas Perempuan. (2016, Maret 7). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2016*. Retrieved from komnasperempuan.go.id: <https://www.komnasperempuan.go.id/realisasi-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>.
- Kompas.com. (2016, Desember 29). *11 Jenis Kejahatan yang Menonjol Selama 2016*. Retrieved Maret 24, 2017, from megapolitan.kompas.com: <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/29/17470511/ini.11.jenis.kejahatan.yang.menonjol.selama>.
- Manurung, Ria. (2002). *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation.
- MaPPI FHUI. (2018). *Kekerasan Seksual*. Retrieved from mappifhui.org: <http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>

- Mulia, Musda. (2014). *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka.
- Mutiah, Riska. (2019). *Sistem Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Komunitas. Volume 10. Nomor 1: 58-74. *Sumber dari Jurnal satu penulis*.
- Palulungan, L. Kordi, H., & Ramli, T. (2017). *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). *Sumber dari Buku tiga penulis*.
- Palulungan, L. Kordi, H., & Ramli, T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). *Sumber dari Buku tiga penulis*
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Penerbit Garudhawaca ISBN: 9786027949935. *Sumber dari Jurnal satu penulis*.
- Saidah Sakwan, dkk. (2007). *Politik Perempuan dalam Ormas Keagamaan*. Jakarta: IRCOS.
- Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*. Social Work Jurnal. Volume 7 Nomor 1;1-29 ISSN:2339 - 0042. *Sumber dari Jurnal dua penulis*.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara. *Sumber dari Buku satu penulis*.
- Walby, Sylvia. (1989). *Theorizing Patriarchy*. Society journal, Volume 23, No.2. Published by: [Sage Publications, Ltd.](https://www.sagepub.com) <https://www.jstor.org/stable/i40108616>. *Sumber dari Jurnal satu penulis*.

PROFIL PENULIS



Yovita Erin Sastrini,Amd.Kep,SKM,M.Kes

Penulis merupakan Dosen STIKES Dirgahayu Samarinda Program Studi Diploma-III Keperawatan, sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang penulis telah hasilkan yaitu buku ajar Promosi Kesehatan (teori dan praktik), buku Asuhan Keperawatan Maternitas, buku Keperawatan Holistik, buku Sistem Informasi Keperawatan, serta modul-modul praktikum. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pengabdian kepada masyarakat pernah memperoleh hibah dari KEMENRISTEKDIKTI program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) “Griya Sehat Bayi Balita” tahun 2018, memperoleh hak intelektual (HAKI) untuk karya cipta lagu “Mars Griya Sehat Bayi Balita pada tahun 2019. Penulis aktif dalam publikasi jurnal penelitian baik nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada workshop/seminar tertentu.

Email: y.erinsastrini@yahoo.com



BAB 4

JERITAN

PEREMPUAN YANG

TERKUNGGUNG

SISTEM PATRIARKI

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP
Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

A. PEREMPUAN DAN PATRIARKI

Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki secara historis dan struktural memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam banyak aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan keluarga. Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi struktur budaya masyarakat menyebabkan adanya disparitas dan ketidakadilan gender yang berdampak pada berbagai aspek aktivitas manusia. Laki-laki memegang peran utama sebagai pengendali dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bahkan kekurangan hak dalam wilayah umum, termasuk dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, termasuk institusi pernikahan. Akibatnya, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat atau inferior.

Restriksi peran perempuan yang dipraktikkan dalam budaya patriarki mengakibatkan keterbelengguan perempuan dan perlakuan yang tidak adil. Contohnya, pada masa Veda sekitar 1500 SM, perempuan tidak diberikan bagian warisan dari suami atau keluarga yang meninggal dunia. Dalam tradisi Buddha pada sekitar tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas dan minim pendidikan, yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, perempuan dianggap lebih rendah, najis, dan menjadi sumber kontaminasi. Oleh karena itu, mereka dilarang menghadiri upacara keagamaan dan hanya diizinkan di area rumah ibadah. Hal serupa terjadi di Indonesia, baik saat masa penjajahan Belanda maupun Jepang, di mana perempuan dijadikan sebagai objek budak seks bagi tentara asing yang berdinasi di Indonesia. Juga, aturan yang melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.

Praktik budaya patriarki ini masih mengakar dalam bentuk diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan menciptakan hambatan struktural yang menghalangi individu dalam masyarakat untuk mendapatkan akses yang setara. Selain itu, hasil dari kebijakan pemerintah yang kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan seringkali mengakibatkan perempuan menjadi korban kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan

hukum terhadap perempuan juga secara tidak langsung mengakibatkan marginalisasi perempuan. Aspek sejarah dan budaya telah menempatkan perempuan dalam posisi yang terjajah melalui dinamika kekuasaan patriarkal, baik dalam skala personal maupun struktur negara.

Perempuan dan patriarki merupakan dua entitas yang terjalin dalam hubungan yang kompleks dan seringkali menentukan dinamika sosial dalam masyarakat. Patriarki mengacu pada suatu sistem sosial di mana laki-laki secara tradisional memegang kendali dan kekuasaan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam struktur patriarki, perempuan cenderung ditempatkan dalam peran yang lebih rendah, sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan politik dan sosial. Budaya patriarki mengakar dalam pola pikir dan norma-norma yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan gender. Perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah, kurang berpengaruh, atau hanya bertugas dalam peran-peran domestik. Namun, perempuan memiliki kapasitas, potensi, dan kontribusi yang sama pentingnya dalam perkembangan masyarakat. Transformasi sosial dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender telah mendorong perjuangan perempuan untuk mengatasi batasan-batasan patriarki, meraih kesempatan yang setara, dan mengubah norma-norma yang menghambat kebebasan dan potensi mereka. Proses ini melibatkan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam semua bidang, berperan dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan pengakuan yang adil atas hak-hak mereka.

B. JERITAN PEREMPUAN YANG TERKUNGGUNG SISTEM PATRIARKI

Jeritan perempuan yang terkungkung dalam sistem patriarki adalah suara dan pengalaman perempuan yang merasa terkekang, terbatas, atau tidak adil karena norma-norma, struktur sosial, dan nilai-nilai yang mendominasi dalam masyarakat yang didasarkan pada patriarki. Dalam konteks ini, jeritan perempuan mewakili perlawanan, kekecewaan, dan aspirasi perempuan yang mengalami ketidaksetaraan dan penindasan akibat sistem ini. Jeritan tersebut dapat meliputi:

1. Keterbatasan Kesempatan Ekonomi

Dalam sistem patriarki, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses kesempatan ekonomi yang setara dengan laki-laki. Mereka mungkin mendapatkan bayaran yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama, atau memiliki kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Kasus keterbatasan kesempatan ekonomi bagi perempuan merupakan salah satu dampak yang kuat terkait dengan budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam konteks budaya yang didominasi oleh patriarki, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mencapai akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Norma-norma dan keyakinan yang melibatkan peran gender yang kaku dapat membatasi perempuan dalam memasuki lapangan pekerjaan yang dianggap "khusus" untuk laki-laki, serta membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk berkembang di bidang karir.

Budaya patriarki juga dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peran perempuan dalam ekonomi. Perempuan sering dilihat sebagai pemegang peran tradisional dalam rumah tangga dan merawat keluarga, sehingga mungkin dianggap bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja secara penuh. Stereotipe seperti ini dapat menghasilkan perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal perekrutan, gaji yang lebih rendah, dan peluang promosi yang terbatas.

Data menunjukkan perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki di Indonesia pada tahun 2017 adalah 50,89 : 82,51 (BPS,2017), hal ini menunjukkan TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki yang berusia 15 tahun ke atas yaitu sebesar 96,7 Juta : 95,88 Juta (BPS,2017). Dari data-data tersebut dapat menunjukkan bahwa 47,24 juta perempuan usia produktif di Indonesia tidak aktif secara ekonomi (Scholastica, 2018). Berdasarkan studi yang dilakukan di sebagian besar negara berkembang, ketimpangan TPAK antara laki-laki dan perempuan sudah umum terjadi (Verick,2018). Salah satu penyebab masih rendah TPAK perempuan di Indonesia adalah faktor budaya dan norma yang masih berlaku di sebagian besar masyarakat yaitu peran tradisi lebih penting dari peran transisinya

DAFTAR PUSTAKA

- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarki. 8 (1).
- Kania, D. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Sebuah Kajian Gender dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 609-641
- Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58-74.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Nursaptini, M. S., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 12(2), 16-26.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Scholastica, G. (2018). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki. *Tirto.Id*.
- Supeni, R. E., & Sari, M. I. (2011). UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA KECIL (Studi diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember). In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Verick, S. (2018). Female Labor Force Participation in Developing Countries. *IZA World of Labor*.

PROFIL PENULIS



Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd. Lahir di Klaten tanggal 02 September 1993. Lulus S1 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014, dan Sekolah Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Saat ini adalah dosen di Institut Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Artikel dan buku yang pernah ditulis oleh penulis bisa dilihat melalui:

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=pTPo46cAAAAJ>

Email: septianikaa@gmail.com

Sinta ID 6773330 - Orchid ID 0000-0002-3403-2647



BAB 5
PERLAWANAN
PEREMPUAN
TERHADAP
DOMINASI
PATRIARKI

Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.
Universitas Aisyah Pringsewu Lampung

A. PENDAHULUAN

Patriarki dan dominasi maskulinitas adalah konsep-konsep yang terkait dengan struktur kekuasaan dan peran gender dalam masyarakat. Mereka mencerminkan cara di mana masyarakat telah diatur oleh norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang memberikan keunggulan dan kekuasaan kepada laki-laki, sementara perempuan seringkali dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial. Patriarki dan dominasi maskulinitas dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender yang melibatkan keterbatasan akses perempuan terhadap peluang dan sumber daya yang sama dengan laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan sosial. Efek berantai ketidaksetaraan gender terkait dengan norma-norma gender yang patriarkal dan stereotipikal dapat membatasi peran dan ekspektasi perempuan, menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan.

Upaya dalam mengatasi efek berantai ketidaksetaraan gender memerlukan pendekatan yang komprehensif Perjuangan untuk meruntuhkan patriarki dan mendefinisikan ulang norma-norma maskulinitas adalah bagian penting dari perjuangan menuju kesetaraan gender dan keadilan sosial. Banyak gerakan feminis dan kelompok aktivis berkomitmen untuk mengubah pandangan dan struktur yang mempertahankan dominasi ini agar masyarakat menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua individu, independen dari jenis kelamin mereka. Pembahasan tentang perlawanan perempuan terhadap patriarki sangat penting karena mencerminkan perjuangan untuk kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Inisiatif ini mendorong perubahan dalam norma-norma sosial dan struktur kekuasaan yang telah menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

B. DOMINASI PATRIARKI

Dominasi patriarki mengacu pada sistem sosial, budaya, dan politik di mana laki-laki memiliki keunggulan dan kontrol yang dominan atas perempuan. Istilah ini berasal dari kata "patriarki", yang mengacu pada sistem sosial di mana otoritas dan kekuasaan terpusat pada laki-laki, terutama dalam keluarga dan struktur masyarakat yang lebih luas. Dalam dominasi patriarki,

laki-laki dianggap lebih unggul dan memiliki hak istimewa dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pendidikan, pekerjaan, dan hak hukum. Budaya ini mencerminkan struktur sosial yang meletakkan laki-laki dalam posisi otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan, serta mempertahankan norma-norma yang mendukung hierarki gender yang tidak merata.

Dominasi patriarki berdampak negatif pada kesetaraan gender dan menghasilkan ketidaksetaraan serta ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya untuk melawan dominasi patriarki melibatkan perjuangan menuju kesetaraan gender dan penghapusan stereotip serta norma yang merugikan perempuan. Hal ini mencakup advokasi, pendidikan, kampanye, dan perubahan sosial yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

C. PERSEPSI LAKI-LAKI TERHADAP DOMINASI PATRIARKI

Persepsi laki-laki terhadap dominasi patriarki dapat bervariasi luas tergantung pada budaya, lingkungan, latar belakang pribadi, dan pandangan mereka terhadap isu-isu gender. Berikut adalah beberapa cara persepsi laki-laki terhadap dominasi patriarki dapat bervariasi:

1. **Pemahaman dan Kepedulian:** beberapa laki-laki mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang dampak negatif dominasi patriarki terhadap perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka dapat merasa empati terhadap perjuangan perempuan dalam melawan ketidaksetaraan dan mendukung upaya untuk merubah norma-norma yang merugikan.
2. **Sensitivitas terhadap Isu-Isu Gender:** beberapa laki-laki memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu gender dan menyadari bahwa perjuangan perempuan dalam melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan adalah penting. Mereka mungkin aktif dalam mendukung perempuan dan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih inklusif.
3. **Ketidakpedulian atau Tidak Menyadari:** di sisi lain, beberapa laki-laki mungkin tidak menyadari dampak dominasi patriarki atau merasa bahwa isu-isu tersebut tidak relevan bagi mereka. Mereka mungkin menganggap isu-isu tersebut sebagai keluhan atau tuntutan yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. D. (2014). *Rekam juang komnas perempuan: 16 tahun menghapus kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ainiyah, Q. (2015). *Keadilan gender dalam islam*. Malang: Intrans Publishing.
- Asari. (2016). *Hypnoaction: grab your success with hypnosis & neuro linguistic programming*. Yogyakarta: Deepublish.
- Barth, A. & Trübner, M. (2018). Structural stability, quantitative change: A latent class analysis approach towards gender role attitudes in Germany. *Social Science Research*, 72, 183–193. doi:10.1016/j.ssresearch.2018.02.008
- Boehnke, M. (2011). Gender role attitudes around the globe: Egalitarian vs. traditional views. *Asian Journal of Social Science*, 39(1), 57–74. doi:10.1163/156853111X554438
- Chetry, P. (2023). Politics of gender: challenges of being a feminist male women human rights defender in the north-eastern periphery of India. *Gender & Development*, 31(1), 125–141. doi:10.1080/13552074.2023.2177018
- Çınar, H. G., & Baykal, Ü. (2021). Determining the Effect of Neuro-Linguistic Programming Techniques on the Conflict- and Interpersonal Problem-Solving Skills of Nurse Managers with a Mixed Method. *Journal of Nursing Management*. doi:10.1111/jonm.13455
- DeKeseredy, W. S. (2020). Bringing Feminist Sociological Analyses of Patriarchy Back to the Forefront of the Study of Woman Abuse. *Violence Against Women*, 27(5), 621–638. doi:10.1177/1077801220958485
- Estevan-Reina, L., de Lemus, S., Megías, J. L., Kutlaca, M., Belmonte-García, M., & Becker, J. (2020). Allies Against Sexism: The Impact of Men's Egalitarian Versus Paternalistic Confrontation on Women's Empowerment and Well-Being. *Sex Roles*. doi:10.1007/s11199-020-01184-4
- Hanum, F. (2018). *Kajian dan dinamika gender*. Malang: Intrans Publishing.

- Herdiansyah. (2016). *Gender dalam perspektif psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hipludin, A. (2019). *Politik gender*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Kemenpppa RI. (2013). *Pembangunan manusia berbasis gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kotera, Y., Lieu, J., & Aladeh, M. (2022). Ethical challenges of neuro-linguistic programming: definition, boundary, and unpreparedness for when it doesn't work. *International Journal of Spa and Wellness*, 5(3), 330-336. doi:10.1080/24721735.2022.2101741
- Kreft, A.-K. (2020). Civil society perspectives on sexual violence in conflict: patriarchy and war strategy in Colombia. *International Affairs*. doi:10.1093/ia/iiz257
- Leykum, L. K. (2023). Lessons From the Front Line of Fighting Gender Inequity. *Annals of Internal Medicine*, 176(2), 272-273. doi:10.7326/M22-3213
- Montero, J. M. C., Vasquez, M. A., Salvador, J. L. B., & Estrada, G. C. T. (2023). Programación neuro lingüística y resiliencia organizacional. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(93), 384-396.
- Mshweshwe, L. (2020). Understanding domestic violence: masculinity, culture, traditions. *Heliyon*, 6(10), e05334. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05334
- Mustafa, M., Batool, A., Fatima, B., Nawaz, F., Toyama, K., & Raza, A. A. (2020). Patriarchy, Maternal Health and Spiritual Healing. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. doi:10.1145/3313831.3376294
- Ojediran, F. (Olufunmilola), & Anderson, A. (2020). Women's Entrepreneurship in the Global South: Empowering and Emancipating? *Administrative Sciences*, 10(4), 87. doi:10.3390/admsci10040087
- Parra, R. M. R., Arenas, L. A. B., Espina-Romero, L. C., Rosendo, E. J. G., & Ángeles, C. H. R. (2022). Effects of a Neuroscience-Based Instructional Guide on College Student Learning. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(2), 34-48. doi:10.26803/ijlter.21.2.3

- Porter, G., Hampshire, K., Abane, A., Munthali, A., Robson, E., De Lannoy, A., ... Owusu, S. (2019). Mobile phones, gender, and female empowerment in sub-Saharan Africa: studies with African youth. *Information Technology for Development*, 1–14. doi:10.1080/02681102.2019.162250
- Sailendra, A. (2017). *Amazing NLP: neuro linguistic programming dari konsep hingga teknik*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Seda, F. S. S. E. (2016). *Perempuan: perspektif sosiologi gender*. Jakarta: UI-Press.
- Sikweyiya, Y., Addo-Lartey, A. A., Alangea, D. O., Dako-Gyeke, P., Chirwa, E. D., Coker-Appiah, D., ... Jewkes, R. (2020). Patriarchy and gender-inequitable attitudes as drivers of intimate partner violence against women in the central region of Ghana. *BMC Public Health*, 20(1). doi:10.1186/s12889-020-08825-z
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2019). *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Malang: UB Press.
- Vijayarasa, R. (2020). *International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women*. London: Routledge.
- Walby, S. (2014). *Teorisasi patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Yunus, Y., Muzni, N., Talakua, J., & Tondok, L. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki, & kesetaraan gender*. Makassar: Yayasan Bakti.

PROFIL PENULIS



Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada 20 Desember 1996. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Lampung, penulis memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (Amd.Keb.), serta Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb.) dari Program Studi D III dan D IV Kebidanan, Fakultas Kesehatan - Universitas Aisyah Pringsewu (UAP), Lampung pada tahun 2017 dan tahun 2018. Selanjutnya, penulis memperoleh gelar Magister Kebidanan (M.Keb.) dari Program Studi Magister Kebidanan, Fakultas Kedokteran - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di Program Studi D III Kebidanan, Fakultas Kesehatan - Universitas Aisyah Pringsewu (UAP), Lampung. Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengikuti pelatihan dan *workshop*, konferensi pemuda (tingkat nasional dan internasional), serta menulis beberapa buku. Semoga kajian ilmu pengetahuan serta pengalaman yang disampaikan oleh penulis melalui buku ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat mewedahi minat para pembaca dan menghadirkan kemaslahatan yang berdampak positif bagi masyarakat secara umum, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi tenaga kesehatan, para cendekiawan yang sedang menempuh pendidikan dibidang kesehatan secara khusus.

Email Penulis: jdesriayu@gmail.com



BAB 6
PERAN PEREMPUAN
TERHADAP
REALISASI
PEMBANGUNAN
SDG's

Yuseva Sariati, M.Keb
Universitas Brawijaya

A. PENDAHULUAN

SDG's (*Sustainable Development Goals*) dengan pengertiannya yang merupakan tujuan akan pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam *Transforming Our World*. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkannya pada bulan September 2015 yang juga terangkum dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, serta memiliki 17 cakupan yang menjadi tujuan untuk seluruh dunia. Tujuan mereka adalah untuk mengatasi berbagai tantangan global yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan tujuan mendorong masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang. Setiap SDG disertai dengan target spesifik dan indikator kinerja yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut. 17 SDG tersebut antara lain : (1) memberantas kemiskinan dengan menghilangkan kemiskinan dalam semua dimensinya di seluruh dunia. (2) memastikan ketahanan pangan dengan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. (3) meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan untuk semua, tanpa memandang usia (4) menyediakan pendidikan berkualitas dengan memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar yang berkelanjutan untuk semua (5) mencapai kesetaraan gender dengan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan (6) memastikan air bersih dan sanitasi dengan memastikan air dan sanitasi dapat diakses dan dikelola secara berkelanjutan untuk semua orang. (7) akses ke energi bersih dan terjangkau memastikan akses universal ke sumber energi yang andal, berkelanjutan, dan modern. (8) mempromosikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang langgeng, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh, dan pekerjaan layak untuk semua. (9) mengembangkan industri, inovasi, dan infrastruktur dengan membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. (10) mengurangi ketimpangan dengan mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. (11) menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan membangun pemukiman perkotaan dan manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. (12) mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang

berkelanjutan. (13) mengatasi perubahan iklim dengan mengambil tindakan cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. (14) melestarikan kehidupan laut dengan melestarikan dan menggunakan sumber daya laut dan laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. (15) melindungi ekosistem darat dengan menjaga, memulihkan, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, hutan, dan memerangi degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. (16) mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat dengan membina masyarakat yang damai dan inklusif, memastikan akses terhadap keadilan, dan membangun institusi yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan. (17) menempa kemitraan untuk mencapai tujuan dengan memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kolaborasi global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan ini saling terkait dan holistik, mengakui keterkaitan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan upaya kolaboratif. Mereka menawarkan kerangka kerja bersama bagi pemerintah, organisasi, bisnis, dan individu untuk memperjuangkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua orang. Kendatipun demikian, dalam realisasinya pembangunan yang berkelanjutan tentulah harus memiliki aktor pekerja didalamnya agar target dapat tercapai. Fokus pada aktor pembangunan berkelanjutan ini yang merupakan perempuan sebagaimana tercantum dalam poin (5) mengenai kesetaraan gender. Dimana perempuan pada kenyataannya masih mengalami deskriminasi sosial. Berdasarkan United Nations Development Programme, hanya 55% perempuan di Indonesia yang memegang pekerjaan formal, sementara pria mencapai 83%. Data tahun 2017 memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia menghadapi hambatan hukum dan diskriminasi dalam konteks ekonomi, mencapai tingkat 51%. Situasi ini jelas tidak sesuai dengan SDGs nomor 1.4, yaitu memastikan akses ekonomi yang setara bagi semua warga terutama mereka yang rentan, dan SDGs nomor 16.3, yang mengamanatkan negara untuk menyediakan akses yang setara terhadap keadilan dan perangkat hukum bagi semua. (2) Pada tahun 2016, hasil dari Survey Women's Health and Life Experience mengungkapkan bahwa satu dari tiga wanita Indonesia berusia 15-64 tahun mengakui pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidup mereka. Tingginya angka

kekerasan terhadap perempuan ini jelas tidak sejalan dengan tujuan SDGs nomor lima, yang berfokus pada mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita serta anak perempuan. Tantangan lain terkait partisipasi perempuan di bidang politik, dimana antara tahun 2009-2014 hanya terdapat 18.04% perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tingkat partisipasi perempuan yang rendah dalam arena politik ini tidak sesuai dengan semangat SDGs nomor 5.5, yang menegaskan hak semua perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat, termasuk di bidang politik, sektor publik, dan ekonomi. Keadaan yang semakin rumit dalam isu perempuan di Indonesia disebabkan oleh keragaman budaya, agama, dan ras, yang membentuk beragam kebiasaan dan perspektif hidup. Pada tahun 2016, Indonesia ditempatkan di peringkat 105 dari 159 negara dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender.

Peran perempuan yang sulit diakui kesetaraannya menjadi suatu urgensi yang cukup penting untuk dikaji. Tetang mengapa perempuan dianggap berbeda derajat dengan laki-laki dimulai dengan budaya masyarakat itu sendiri hingga menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk keyakinan meluas hingga seluruh dunia. Padahal sebagai contoh banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang dapat memanfaatkan kesempatan ekonomi dalam beradaptasi dan melalui seleksi alam. Banyaknya program yang dibuat dalam merealisasikan kesetaraan ini antara lain melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment), Australia dan Indonesia berkolaborasi dalam memberikan dukungan kepada perempuan di Indonesia, terutama mereka yang terpinggirkan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan dan memperluas akses mereka di berbagai sektor, serta untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs yang terkait Pentingnya penguatan perspektif gender dalam pembangunan melalui upaya pemberdayaan perempuan masih sangat relevan. Relevansi ini semakin tergambar dengan diperkenalkannya kerangka pembangunan global yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs merinci agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, dengan total 17 tujuan pembangunan. Dalam SDGs, prinsip kesetaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). *EGALITA*, 13(1).
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70-82.
- Deshpande, N. A., & Nour, N. M. (2013). Sex trafficking of women and girls. *Reviewsin obstetrics & gynecology*, 6(1), e22–e27.
- Info kit Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU)2012-2020”, Mampu-Bappenas, diakses pada 16 Agustus 2023, <http://mampu.bappenas.go.id/pengetahuan/publikasi/mampu-info-kit-mei-2019/>.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Kusumastuti, A. E. (2019). Peran Perempuan Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 39-46.
- Nurika, R. R. (2023). KONTRIBUSI PROGRAM MAJU PEREMPUAN INDONESIA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (MAMPU) TERHADAP PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA. *SIYAR Journal*, 3(1), 14-30.
- Saptandari, P. (2022). *BUKU AJAR ANTROPOLOGI PEMBANGUNAN dalam Bingkai Pluralisme dan Feminisme*. Airlangga University Press.
- Sugiarti, Y., & Sutrisni, S. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha Pengolahan Buah Siwalan Di Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang-Batang. *Jurnal ABDIRAJA*, 3(2), 15-17.
- Syarif, A. (2018). Pemberdayaan perempuan menghadapi modernisasi pertanian melalui kelompok wanita tani (KWT) pada usahatani

sayuran di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*, 43(1), 77-84

Tini, D. L. R. (2019). Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 148-156

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63-77.

Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website: a literatur review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 119-133.

WHO, RESPECT women: Preventing violence against women, 2019

Widianto, A. A. (2018). Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 193-212.

PROFIL PENULIS



Yuseva Sariati lahir di Bandung, anak ke tiga dari lima bersaudara dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikannya di Program Studi Penyuluhan Pembangunan dengan peminatan Promosi Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menjadi Dosen pada tahun 2004 dengan memulai karir sebagai dosen di STIK Immanuel Bandung dan tahun 2014 berkarir di Universitas Brawijaya Malang dengan homebase di Prodi Profesi Bidan. Pengalaman menulis, melakukan penelitian dan pengambian masyarakat dapat dilihat di [Yuseva Sariati - Google Scholar](#).



BAB 7

KEPEMIMPINAN

PEREMPUAN DI

RANAH PUBLIK

Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th
STT Ekumene Jakarta

A. PENDAHULUAN

Bab sebelumnya membahas peran perempuan terhadap realisasi pembangunan SDG's, sementara bab ini membahas kepemimpinan perempuan di ranah publik. Perempuan hampir selalu diidentikkan dengan berbagai urusan rumah tangga. Hal ini merupakan *stereotype* yang dialami oleh perempuan di masyarakat pada umumnya. Perempuan memiliki sikap dan *stereotype* negatif yang mengidentifikasi perempuan dengan rumah tangga. Dalam buku Sangkan Paran Gender (Warto, 1997) disebutkan bahwa seorang wanita harus terampil macak (menyapu), masak (memasak) dan manak (melahirkan). Ketika ketiga hal tersebut gagal, perempuan dianggap tidak memiliki nilai baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Seorang wanita yang tidak bisa memasak atau memiliki anak dianggap memalukan di masyarakat dan keluarga. Dalam hal ini, *stereotype* adalah salah satu konteks ketidaksetaraan gender yang dirasakan. Misalnya perempuan penurut, tidak rasional, bimbang, perempuan hanya tahu pekerjaan rumah, dll. (Wulandari, 2020).

Abraham Nurcahyo, mengemukakan bahwa budaya patriarki dan nilai-nilai sosial Indonesia mendikte bahwa perempuan tidak berpartisipasi dalam politik atau pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah tentang isu perempuan semakin spesifik gender. Namun, status perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dijadikan alat legitimasi. Realitas sejarah menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran di sepanjang gerakan. Misalnya Rasuna Said, Rohana Kudus dan Rasimah Ismail yang berasal dari Minangkabau yang mampu membangkitkan kesadaran dan memperkuat nasionalisme di kalangan perempuan. Sejarah juga menceritakan bahwa dua bulan setelah pencahangan Janji Pemuda, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1928, sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul untuk mengadakan Kongres Wanita pertama di Yogyakarta. Gerakan perempuan Indonesia aktif terlibat dalam politik, namun masih ada kesenjangan dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur politik resmi. Keterwakilan politik perempuan sangat penting jika kita ingin menghadirkan demokrasi yang ramah seks (gender democracy). Pada masa rezim lama dan baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sementara pada masa reformasi justru meningkat. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berpusat

pada kesejahteraan rakyat, diperlukan keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. (Nurchayyo, 2016).

Sementara itu Asnath N. Natar mengemukakan pula, bahwa saat ini wanita yang menjadi pimpinan sudah semakin meningkat di hampir semua bidang kehidupan. Negara Indonesia pernah dipimpin oleh presiden wanita dan saat ini wanita juga ada yang menjabat sebagai kepala daerah di beberapa wilayah. Mereka juga mengisi posisi di lembaga legislatif dan menjabat sebagai pimpinan di lembaga pemerintah serta perusahaan. Memang harus diakui bahwa jumlah mereka belum sebanyak pria dan ini tentunya menjadi tantangan ke depan. Tantangan yang terbesar selalu berasal dari agama dan budaya. Agama dan budaya yang dominan pria ini juga didukung dengan konsep politik yang dominan pria, feodalistik & berorientasi maskulin, di mana kekuasaan politik ada pada pria, yang akan mengambil keputusan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. (Natar, 2019).

B. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan (*leadership*) dibagi tiga, yaitu: (1) *Self Leadership*; (2) *Team Leadership*; dan (3) *Organizational Leadership*. *Self Leadership* artinya memimpin diri sendiri agar tidak gagal dalam hidup. *Team Leadership* dipahami sebagai memimpin orang lain. Pemimpin dikenal sebagai pemimpin tim (*team leader*) yang memahami apa tanggung jawab kepeimpinannya, memahami kondisi bawahannya, bersedia menyesuaikan diri dengan persyaratan dan konsekuensi tanggung jawab yang dipikulnya, serta berkomitmen untuk memimpin setiap bawahannya untuk menemukan kemampuannya sendiri untuk menciptakan prestasi. Sedangkan *Organizational Leadership* terlihat dalam konteks organisasi yang dipimpin oleh pemimpin organisasi yang memiliki kemampuan memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnis, kemauan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, dan komitmen yang kuat untuk menjadikan bisnis yang dipimpinnya menjadi berkah bagi masyarakat setempat, nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfa. (2016). Kepemimpinan Perempuan Indonesia di Masa Depan. Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia”. Univesity Club (UC) UGM Yogyakarta <https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>. Diakses 14 Agustus 2023.
- Anshor, Maria Ulfah. (2008). Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal. Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 3, No 1. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/189>.
- Astuti. Rini Puji. (2019). Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Kepemimpinan Efektif. Jurnal An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman. Vol. 12, No. 2. DOI: [10.35719/annisa.v12i2.19](https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.19).
- Bro Perundang-Undangan. (2023). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 23 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB III, Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Bakal Calon. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu.010.pdf.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2023). Puan: Aturan Pemilu Harus Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44672/t/Puan:%20Aturan%20Pemilu%20Harus%20Dukung%20Peningkatan%20Keterwakilan%20Perempuan%20di%20Parlemen>.
- Harmayani, Eni. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan. Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia”. Univesity Club (UC) UGM Yogyakarta <https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>. Diakses 10 Agustus 2023.
- Hartini, Surti. (2016). Kepemimpinan Perempuan Di Bidang Pemerintahan. Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia”. Univesity Club (UC) UGM Yogyakarta

<https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>. Diakses 12 Agustus 2023.

Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Megawati Soekarno Putri. (2020). <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/selamat-ulang-tahun-ke-72-ibu-megawati-soekarnoputri-presiden-ri-ke-5/>. Diakses 3 Agustus 2023.

Natar. Anath N. (2019) Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Volume 18, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.133-147>.

Nofianti. Leny. (2016). Perempuan Di Sektor Publik. *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, Vol. 15, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>.

Nurchayyo, Abraham. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*. Vol 6, No 01. DOI: <http://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>.

Oetami, RA. Arida. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat. Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia”. Univesity Club (UC) UGM Yogyakarta <https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>. Diakses 12 Agustus 2023.

Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2020). https://www.dpr.go.id/images_akd/files/CV%20PUAN%20MAHARANI.pdf. Diakses 3 Agustus 2023.

Purwanti, Sumy Hastry. (2021). <https://jakarta.tribunnews.com/2021/02/01/sosok-dr-sumy-hastry-ahli-forensik-yang-diakui-dunia-tangani-sriwijaya-air-dan-deretan-kasus-lain>. Ferdinand Waskita Suryachya. Diakses 5 Agustus 2023.

Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. (2016). Seminar Nasional “Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia”. Univesity Club (UC) UGM Yogyakarta <https://psw.ugm.ac.id/2017/09/18/kepemimpinan-perempuan-di-indonesia/>. Diakses 07 Agustus 2023.

- Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). https://www.kemlu.go.id/bucharest/id/pages/menteri_luar_negeri_republik_indonesia/3949/etc-menu. Diakses 5 Agustus 2023.
- Sahban, Hernita. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Ilmiah BONGAYA (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 1 No. 1. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/8>.
- Sasmita, Jumati & Raihan, Said As'ad. (2014). Kepemimpinan Pria dan Wanita. PROCEEDING OF THE 6TH NCFB AND DOCTORAL COLLOQUIUM TOWARDS A NEW INDONESIA BUSINESS ARCHITECTURE, "Strategic Leadership: A Necessity for Prosperity and Sustainability" FAKULTAS BISNIS DAN PASCASARJANA UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA. URI: <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5652>.
- Soeharto, Achmad. (2011). Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. MUWAZAH: JURNAL KAJIAN GENDER, Vol. 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.7>
- Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI. (2022). LHKPN. <https://www.kemenkeu.go.id/profile/profile-pejabat/Menteri-Keuangan>. Diakses 5 Agustus 2023.
- Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI. (2019). <https://kemensos.go.id/profil-menteri>. Diakses 3 Agustus 2023.
- Wulandari, Astri. (2020). Perspektif Perempuan Jawa Siti Walidah Dalam Film Nyai Ahmad Dahlan. *SEMIOTIKA: JURNAL KOMUNIKASI*. Vol 14, No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v14i2.2338>.
- Zuhriyah, Lailatuzz. (2018). Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2 No 2. <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>.

PROFIL PENULIS



Nelson Hasibuan dilahirkan di desa Cinta Maju Dusun 7 Kec. Talawi Kab. Asahan, Sumatera Utara 24 April 1987, sebagai anak ke delapan dari delapan bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA di SMA Negeri 1 Talawi-Batu-Bara, dan kemudian menempuh studi di STT Kharisma Bandung pada bidang studi Teologi Jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK) tahun 2012. Kemudian melanjutkan kembali di kampus yang sama pada bidang studi Teologi, konsentrasi Pendidikan Agama Kristen, 2015. Dari tahun 2011-2015 mengajar di berbagai sekolah Kristen dan Negeri di Bandung sebagai guru Agama Kristen. Tahun 2016-2018, ia menjadi tenaga pengajar tetap di bidang pendidikan Kristen dan wakil ketua 1 bidang Akademik di Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron Lampung. Buku yang ditulis yaitu, *CTL dan PAK: Perubahan Paradigma Pendidik Kepada Praktik Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK)* tahun 2018. Tahun 2019 sampai sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta serta sedang menyelesaikan disertasi, Doktor Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. E-mail: hasibuan.nelson@gmail.com

BAB 8

AKSES PEREMPUAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP
Universitas Darul Ulum Islamic Center
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran
Semarang

A. PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan adalah prerogatif semua warga, sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional diarahkan kepada seluruh warga negara. Dalam menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, pemerintah telah mengadopsi serangkaian langkah, termasuk implementasi wajib belajar selama 6 tahun, kemudian ditingkatkan menjadi 9 tahun, dan saat ini dicanangkan wajib belajar selama 12 tahun. Untuk memastikan berhasilnya program ini, negara telah memberikan jaminan akses pendidikan kepada warga yang menghadapi keterbatasan finansial melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar.

Meskipun pemerintah telah berusaha memfasilitasi akses pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan dasar, masih ada sejumlah warga yang belum mampu merasakannya. Realitas ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018, di mana pencapaian pembangunan manusia pada pria secara keseluruhan lebih tinggi daripada wanita. Data menunjukkan IPM pria mencapai 75,43 sementara IPM wanita hanya 68,63 (Badan Pusat Statistik, 2018). Dalam konsepnya, hal ini menggambarkan adanya ketidaksetaraan gender yang signifikan.

Akses perempuan di bidang pendidikan adalah isu yang memiliki dampak besar terhadap kesetaraan gender dan pembangunan sosial. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memperluas akses pendidikan bagi perempuan di seluruh dunia, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar akses pendidikan perempuan menjadi lebih merata. Salah satu faktor yang memicu kesenjangan akses pendidikan bagi perempuan adalah adanya budaya patriarki, yang meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia (Nasir & Lilianti, 2017). Dalam masyarakat yang menganut pandangan ini, peran laki-laki diberikan dominansi dalam berbagai aspek dibandingkan perempuan (Rokhmansyah, 2016).

Akses pendidikan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Walaupun begitu masih terdapat warga negara yang terdiskriminasi dalam mendapatkan haknya. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang angka melek huruf dan buta huruf angka rata-rata lama sekolah. Data-data itu menunjukkan masih terhambatnya penduduk Perempuan dalam mengakses pendidikan. Keadaan

ini tidak lepas dari masih langgengnya budaya patriarki dalam masyarakat yang memprioritaskan anak laki-laki dalam akses di segala bidang.

Patriarki dapat berdampak negatif terhadap akses pendidikan perempuan. Budaya yang memberi prioritas pada pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan dapat menyebabkan perempuan kurang mendapatkan kesempatan belajar. Norma-norma yang mengharuskan perempuan mengurus rumah tangga dan keluarga juga dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat pandangan bahwa pendidikan tinggi tidaklah diperlukan bagi perempuan, karena akhirnya perempuan akan diarahkan ke ranah dapur. Bahkan, dalam keluarga yang memiliki keterbatasan finansial, pendidikan lebih sering diprioritaskan untuk anak laki-laki (Narwoko, J. Dwi & Suyanto, 2013). Orang tua cenderung lebih mementingkan pendidikan tinggi bagi anak laki-laki sementara anak perempuan diarahkan untuk tinggal di rumah.

Keadaan ini menyulitkan anak perempuan dalam mengakses pengetahuan. Pada dasarnya, faktor budaya memainkan peran penting yang menyebabkan kesenjangan dalam akses bagi individu dalam keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Salah satu rintangan budaya yang signifikan adalah relasi gender yang tidak adil dan setara, sebagai dampak dari budaya yang sangat cenderung patriarkis. Dalam konteks masyarakat, kondisi ini menjadi jelas dengan terus adanya keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya yang masih sangat mencolok (Arjani, 2007).

Upaya untuk meratakan akses pendidikan bermakna memberikan peluang yang setara kepada setiap individu dalam memperoleh pendidikan. Pemerataan kesempatan dalam pendidikan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi persamaan kesempatan dan dimensi keadilan. Persamaan kesempatan menilai apakah akses pendidikan sudah tersebar secara merata. Sementara itu, dimensi keadilan mengamati apakah peluang mendapatkan pendidikan sama di semua kelompok.

Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak untuk menerima pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Untuk mewujudkannya, tindakan nyata telah diambil, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan bantuan lainnya untuk pendidikan tinggi.

Walaupun sudah ada peraturan yang bertujuan untuk memastikan kesamaan akses pendidikan bagi semua warga negara, namun realitanya dalam masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah individu terpinggirkan dari akses pendidikan, hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengaruh budaya dan norma-norma yang ada.

B. PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN

Peran perempuan dalam pendidikan dalam konteks patriarki sering kali terpengaruh oleh struktur kuasa yang memberikan dominasi kepada laki-laki dan membatasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif patriarki, peran perempuan dalam pendidikan dapat mencerminkan hambatan dan dinamika yang berkaitan dengan norma-norma sosial yang telah ada selama berabad-abad. Perempuan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi transformasi positif dalam sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi evolusi yang terus berubah dari waktu ke waktu, peran perempuan menjadi semakin penting dalam berbagai bidang dalam masyarakat. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini menjadi semakin relevan karena ada tekanan dari komunitas global dan bangsa-bangsa untuk mengukur perkembangan suatu negara berdasarkan perlakuan terhadap perempuan. Pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan memberikan akses yang setara kepada perempuan dalam berbagai aktivitas dan pembangunan negara menjadi perhatian utama.

Dalam era modern ini, dalam berbagai perdebatan dan pembicaraan publik, terlihat dengan jelas bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender yang telah lama diperjuangkan telah menghasilkan perkembangan yang signifikan. Terutama dalam konteks peran perempuan, pandangan tentang persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hasil ini muncul dan diberdayakan oleh kesadaran yang semakin tumbuh di kalangan perempuan sendiri tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan umat manusia, terutama perempuan. Pentingnya pendidikan ini diakui dalam menghadapi persaingan kerja dan peluang karir yang setara dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. (2021). Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan Perspektif HAMKA. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 4(01), 115-135.
- Achmad, S. (2019). Membangun pendidikan berwawasan gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 70-91.
- Almutamah, S. (2021). Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam. *PEDIAMU: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 1, 51-64.
- Arjani, N. L. (2007). Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Gender Srikandi*, 6(1), 1–10.
- Farin, S. E. (2021). Peran perempuan dalam pendidikan di Indonesia pada zaman modern. *OSF Preprints*. May, 1(2), 1-6.
- Fitrianti, R., & Habibullah, H. (2012). KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 85-100.
- Isnaini, R. L. (2016). Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 2-16.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nursaptini, M. S., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya patriarki dan akses perempuan dalam pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 12(2), 16-26.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawacana.

PROFIL PENULIS



Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I., CPHCEP lahir di Sukoharjo, pada 07 April 1988, Putri Pertama dari Alm. Bapak Rochmad S.Ag dan Ibu Rohmah Suniyati. Pendidikan terakhir Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta 2022.

Penulis menjadi Dosen pada tahun 2017. Memulai karir di STAI Muhammadiyah Klaten 2017-2020 dengan pengalaman struktural sebagai Kepala LPM. Lanjut pada tahun 2021-2022 berkarir di Institut Islam mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Pengalaman Struktural Pernah menjadi Kepala LPM, Tim Audit Mutu Internal (AMI), Kaprodi S2 PAI, Direktur Pascasarjana di Institut Islam mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran Semarang. Untuk melengkapi pengalamannya Penulis merupakan Reviewer dan Editor di beberapa Journal, Fasilitator Penulisan Buku Perguruan Tinggi (Buku Ajar, Monograf dan Refrensi) Selain itu penulis merupakan Owner and Founder Penerbit Tahta Media Group. Penulis juga aktif di Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (*ADPETIKISINDO*) selaku Bendahara Umum periode 2020-2025. Buku dan Artikel yang pernah ditulis oleh penulis bisa dilihat melalui: <https://scholar.google.com/citations?user=UAlcP6wAAAAJ&hl=id> atau ID Sinta Penulis (6724697). Penulis dapat dihubungi melalui Email: uswatunkhasanah6815@gmail.com

BAB 9

AKSES PEREMPUAN DALAM BIDANG KESEHATAN

Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep
Universitas Indonesia



A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual maupun keadaan sosial dan ekonomi, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang selalu menjadi pencapaian individu (Notoatmodjo, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman pencapaian derajat kesehatan bagi setiap individu memiliki banyak peran serta dari berbagai pihak salah satunya ialah peran serta perempuan, wanita atau perempuan merupakan seseorang individu yang memiliki tendensi feminisme yang berorientasi pada kecantikan parasnya (Ibrahim, 2005).

Persentase laki-laki lebih banyak jumlahnya dari pada perempuan, sesuai dengan data sensus Dunia tahun 2022 jumlah perempuan di Dunia sebesar 3,95 miliar, di Indonesia jumlah perempuan sebesar 49,42 persen atau setara dengan nilai 136.361.271 penduduk dikutip dari Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil tahun 2022. Perempuan memiliki persentase yang lebih sedikit dari pada jumlah laki-laki, namun perempuan memiliki peranan yang besar dalam berbagai hal, didalam agama islam seorang ibu dikatakan sebagai “Al Ummu Madrasah Al Ula” seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu memiliki peran besar dalam mendidik, membentuk kepribadian anak, dan mengajarkan sosialisasi kepada seorang anaknya yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Menurut Kongres Wanita Indonesia (2022), perempuan memiliki posisi yang sangat penting sebagai penggerak kesadaran akan kesehatan karena secara social dan budaya perempuan hidup ditengah masyarakat yang paham tentang berbagai masalah serta perempuan dekat dengan generasi-generasi penerus.

Berdasarkan pemaparan diatas, perempuan banyak memiliki andil dalam kehidupan, dengan demikian mempelajari banyak hal adalah keharusan, salah satunya ialah dibidang kesehatan, perempuan harus mengawali hidup sehat pada diri pribadi, keluarga, hingga lingkungan sekitar untuk mencapai derajat kesehatan yang baik. Pengembangan kesehatan di Indonesia menjadi perhatian khusus yang harus dipegang kendali oleh kaum perempuan, beberapa riset membuktikan bahwa pemikiran feminisme pada perempuan dapat menjadi pendukung perkembangan kesehatan bangsa.

B. PENGERTIAN PEREMPUAN DAN KESEHATAN

Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini, menurut Eti (2012), perempuan memiliki perbedaan fisiologis dengan laki-laki perbedaan terlihat dari organ genitalia, hormonal, dan fisiologis tubuh, namun perempuan memiliki sensitivitas perasaan yang lebih peka dibandingkan dengan laki-laki. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, arti kesehatan ialah suatu kondisi sehat atau baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan kesejahteraan yang luas tidak hanya sehat secara fisik saja. Menurut *World Health Organization* (WHO) 2018, kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna secara fisik, mental dan sosial, serta terbebas dari kecacatan yang dapat mengganggu kesejahteraan seseorang. Tentunya dalam upaya-upaya pencapaian kesejahteraan kesehatan harus dilakukan oleh berbagai pihak. Sesuai pengertian diatas dapat dilihat bahwa antara perempuan dan kesehatan memiliki keterkaitan hubungan yang erat, perempuan memiliki jiwa feminisme yang umumnya dimiliki oleh mayoritas kaum hawa sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung pemenuhan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosial.

C. PIHAK YANG BERPERAN PENTING DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Mengacu pada *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menjadi misi pembangunan dan pengembangan kesehatan di Indonesia adalah terwujudnya kualitas masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pencapaian kesehatan dan kesejahteraan tentunya ada beberapa peran penting dari berbagai pihak berikut:

1. Pemerintah

Peran pemerintah pada pelayanan kesehatan merupakan suatu Lembaga yang memberikan tanggung jawab terhadap perencanaan, pembinaan, penyelenggara, dan pengatur pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas layanan terkecil hingga rumah sakit bertaraf internasional (Ainur, 2011).

2. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam bidang peningkatan kesehatan sebagai pendukung dari berbagai program yang sudah diberikan oleh pemerintah, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan suatu proses untuk memupuk kesadaran dan kemauan dalam meningkatkan pola hidup sehat dan menaati program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan untuk setiap individu (Eko, 2017).

D. RUANG LINGKUP PERAN PEREMPUAN DI BIDANG KESEHATAN

Perbedaan gender antar laki-laki dan perempuan tidak menjadi kendala bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai hal, salah satunya ialah perhatian perempuan dibidang kesehatan. Dilansir dari siaran pers Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) memajukan kesehatan perempuan sangat berdampak baik untuk memajukan kesehatan seluruh pihak, adapun peranan perempuan dibidang kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Peran Perempuan Mengontrol Kesehatan Dalam Keluarga

Perempuan memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai pejuang dalam berbagai hal mulai dari ekonomi, Pendidikan, bahkan kesehatan. Peran ibu dalam keluarga yang diperankan oleh seorang perempuan memiliki tugas penting dalam mengontrol kesehatan keluarga. Sehat nya perempuan di sebuah keluarga mencerminkan gaya hidup sehat untuk keluarga nya, berbagai peran kontrol kesehatan keluarga mulai dari menerapkan hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga untuk mencegah berbagai penyakit karena virus dan infeksi, mencegah suami atau anggota keluarga untuk merokok, menyediakan makanan bergizi baik dan higienis bagi anak-anaknya, menerapkan pola asuh yang baik bebas dari beban psikologis pada anak, peran proaktif seorang perempuan dalam memberikan kontrol kesehatan bagi keluarga dapat menjadi pencapaian optimalisasi pertumbuhan kesehatan keluarga yang baik hingga dilingkungan masyarakat (Kemenkes, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofieq. (2011).”pelayanan public dan welfare state”,Governance, 2.
- Eko Kurniawan, Masyarakat sehat yang mandiri dan berkadilan.
Sumbarprov.go.id
- Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012) hlm 21-22.
- <https://m.antaranews.com/amp/berita/3454338/pkjs-ui-perempuan-perlu-tingkatkan-peran-dalam-kesehatan-masyarakat>
- <https://www.bkkbn.go.id/berita-peran-gender-dalam-ber-kb>
- Ibrahim. (2005). Psikologi wanita. Bandung: Pustaka Hidatah
- Notoatmodjo . 2012. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
sehatnegeriku.kemkes.go.id
- Wening Udasmoro. 2004. Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi
Perempuan : Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana
Di Indonesia. Humaniora Volume 16, No . 2, Juni 2004: 147-154
- www.kemenpppa.go.id

PROFIL PENULIS



Ns. Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep lahir di Kalimantan Barat, penulis baru saja menyelesaikan Pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Indonesia, saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Akper Yaspem Puri Medika Jakarta dan sebagai praktisi homecare, penulis juga memiliki pengalaman praktisi klinis di rumah sakit Karunia Kasih pada tahun 2017-2018 dan Alia Hospital pada tahun 2019-2023 sebagai perawat kamar operasi. Sebelumnya penulis juga memiliki

pengalaman menulis buku KMB 1 di Tahta media, serta menulis beberapa jurnal nasional.

Email: ns.andarielsa@gmail.com



BAB 10
PELUANG DAN
TANTANGAN
PEMBANGUNAN
PEREMPUAN DI
INDONESIA

Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M.
Universitas Negeri Gorontalo

A. PENDAHULUAN

Tingkat perkembangan dinamis dan kesuksesan seumur hidup melalui proses kehidupan historis bergantung pada apakah Baik pria maupun wanita bertindak sebagai agen dan penerima. Keterlibatan yang tidak seimbang dan terpinggirkan dari salah satu faktor ini dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Indonesia secara spesifik diberi wewenang untuk melaksanakan persoalan kesetaraan gender dalam pembangunan. Perumusan kebijakan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi inisiatif pembangunan harus mencerminkan kebutuhan dan perspektif perempuan dan laki-laki.

B. SEJARAH PERGERAKAN PEREMPUAN

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, aktivis perempuan tahun 1920-an mendorong kesetaraan gender. Mereka terstruktur di sekitar gerakan agama, komunal, dan politik utama saat itu, dan mengambil bentuk kepedulian sosial-budaya perempuan. Komunitas perempuan, di mana perempuan mungkin merasa aman dan didukung, didirikan, begitu pula sekolah untuk anak perempuan, majalah, dan inisiatif untuk mempromosikan kemandirian ekonomi perempuan.

Poetri Mardika, didirikan di Jakarta pada tahun 1912, merupakan kelompok perempuan formal pertama di Indonesia. Kelompok tersebut "mengangkat" perempuan ke status yang sama dengan laki-laki dengan mengadvokasi pendidikan mereka dan mempromosikan partisipasi publik mereka. Selain itu, beberapa kelompok yang dipimpin oleh para wanita bangsawan didirikan antara tahun 1913 dan 1915, khususnya di Jawa dan Sumatera. Ketika akhirnya diakui pada kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928, bahwa kesetaraan telah dicapai dalam budaya-budaya yang tidak terjajah, sebuah titik balik terjadi dalam kesadaran politik gerakan perempuan. Perubahan kesadaran gender di kalangan perempuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertemuan ini.

Serikat Pekerja Wanita Indonesia adalah organisasi pertama dari jenisnya pada tahun 1940. Fokusnya adalah pada pengalaman praktis. Namun, grup tersebut juga mengambil tindakan terhadap bias gaji dan promosi. Semua organisasi wanita sebelum perang dibubarkan oleh pendudukan Jepang, kecuali yang dibuat oleh Jepang khusus untuk tujuan militer, termasuk

Asosiasi Wanita. Asosiasi Wanita dibentuk dengan tujuan utama mengorganisir angkatan kerja wanita untuk mendukung Tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Wanita juga cenderung menjadi pelacur dan bergabung dengan militer Jepang di wilayah yang ditaklukkan Jepang selama Perang Dunia II. Mereka mungkin secara diam-diam mengorganisir untuk perjuangan kemerdekaan yang akan datang, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak tentang kehancuran ekonomi yang telah dilakukan Jepang atau berbagai kekejaman brutal yang dilakukan oleh pasukan Jepang.

Selama Perang Kemerdekaan, banyak perempuan tampil di garis depan bersama para pejuang lainnya. Ada unit tempur wanita seperti Rasiwi (prajurit wanita Indonesia) di mana-mana. Wanita juga terorganisir di belakang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Serikat perempuan dihapuskan. Ketua serikat perempuan itu juga berpesan pada semua anggota agar merubah organisasi sebelumnya menjadi sebuah organisasi yang bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kelompok itu akhirnya bergabung dengan yang lain untuk membentuk Perwan, atau Persatuan Wanita Indonesia. Barisan Bul Juanita, sebuah organisasi buruh berhaluan kiri, dibentuk setelah banyak organisasi buruh perempuan lainnya bergabung. Pemimpin nasionalis laki-laki mengakui nilai partisipasi perempuan dalam gerakan kemerdekaan. Namun, para pemimpin nasionalis ini menganjurkan keterlibatan perempuan yang lebih sedikit dalam gerakan kemerdekaan daripada partisipasi laki-laki.

C. PERMASALAHAN GENDER

Meski telah diupayakan melalui berbagai strategi dan pendekatan, namun kenyataannya selama ini posisi dan peran perempuan Indonesia belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pendekatan pembangunan yang dikembangkan belum memperhatikan manfaat yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan.

Jika ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki tetap dibatasi oleh perbedaan gender, maka hal itu dapat dipahami dan dianggap dapat diterima. Ketidaksetaraan antar jenis kelamin merupakan akibat dari diskriminasi

berdasarkan jenis kelamin, seperti perbedaan dalam kemungkinan pendidikan yang tersedia atau ditempuh oleh laki-laki dan perempuan.

Konsekuensi diskriminasi jenis kelamin didasarkan pada cita-cita sosio-kultural patriarki yang masih diinginkan dan dilegitimasi oleh masyarakat, bukan atas tindakan sengaja individu atau kelompok individu. Berbagai kebijakan, inisiatif, undang-undang, metode, dan praktik yang ditetapkan telah diubah. Harus ada pembalikan dari seksisme yang melanda upaya pembangunan selama ini. Bahwa asas kesatuan dan solidaritas, serta nilai sejarah perjuangan perempuan, merupakan inti dari visi, maksud, dan tujuan pemberdayaan perempuan. Memajukan hak-hak perempuan dan memperkuat keluarga dan masyarakat adalah mengapa semua tindakan ini penting.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki, perlu dihilangkan hambatan psikologis, politik, dan sosial-budaya yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk berperan aktif dalam masyarakat dan memetik manfaat dari peran tersebut (inilah yang dimaksud dengan “kesetaraan gender”).

Rendahnya usaha partisipasi wanita di sektor pendidikan mengakibatkan rendahnya partisipasi wanita di sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh terbatasnya peluang wanita untuk bekerja dan berbisnis, serta terbatasnya kemampuan mereka untuk mencapai dampak ekonomi seperti teknologi, pengetahuan, pasar, dan modal kerja.

Masalah besar lainnya adalah struktur komunal saat ini, yang tidak memungkinkan pengenalan keadilan dan kesetaraan. Misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum perburuhan, hukum kesehatan, dll. Situasi ini masih menyisakan kurangnya kesadaran gender aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus ketidakadilan terhadap wanita serta kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum masyarakat.

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PERANANNYA DALAM KELUARGA

Ketika perempuan kurang terwakili dalam sistem pendidikan, mereka seringkali kurang terwakili dalam sistem ekonomi. Rendahnya akses perempuan terhadap penggerak ekonomi termasuk teknologi, keahlian, pasar,

DAFTAR PUSTAKA

- Iriansyah, S.H (2019). Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia (Masyarakat Patriarki), Jakarta
- Prantiasih, A (2014) Reposisi Peran Dan Fungsi Perempuan, Malang
- Pratama, P.R.C (2017). Gender Mainstreaming: Peluang dan Tantangan di Dunia Akademik, Banjarmasin
- Suarmini, W.N., Zahrok, S., & Agustin, Y.S.D (2018) Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0,
- Utami, S (2019). Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan di Era Digitalisasi; <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa>
- Warjiyati, S (2016) Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, Surabaya
- Kowima, F (2021) Pemberdayaan Perempuan di Era Modern;
- Putri, N (2022) Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia;
- Media Indonesia, (2023) Perempuan dan Pembangunan; <https://mediaindonesia.com/opini/360218/perempuan-dan-pembangunan>

PROFIL PENULIS



Dr. Andi Yusniar Mendo, SE., M.M.

Penulis dilahirkan di Parepare, 23 September 1970. Menyelesaikan Program S1, S2 dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar masing-masing pada tahun 1995, 2008 dan 2017. Menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2005 hingga kini. Selain kegiatan mengajar penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta aktif mempublikasikan beberapa tulisan hasil penelitian dan pengabdian di berbagai jurnal nasional dan international. Saat ini penulis ditugaskan untuk menjadi Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020 s.d Sekarang Serta aktif dalam pengurusan Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Email: andi.yusniarmendo@ung.ac.id

Bab 1 Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat

Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si (Universitas Lakidende)

Bab 2 Diskriminasi Perempuan

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si (Universitas Riau)

Bab 3 Budaya Patriarki Di Indonesia

Yovita Erin Sastrini, Amd.Kep.,SKM.,M.Kes (STIKES Dirgahayu Samarinda)

Bab 4 Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd., CLSP (Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta)

Bab 5 Perlawanan Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki

Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb. (Universitas Aisyah Pringsewu Lampung)

Bab 6 Peran Perempuan terhadap realisasi Pembangunan SDG's

Yuseva Sariati, M.Keb (Universitas Brawijaya)

Bab 7 Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik

Nelson Hasibuan, S.Pd.K., M.Th (STT Ekumene Jakarta)

Bab 8 Akses Perempuan Dibidang Pendidikan

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran Semarang)

Bab 9 Akses Perempuan Dalam Bidang Kesehatan

Ns.Andari Elsa Dwi Putri.S.Kep.,M.Kep (Universitas Indonesia)

Bab 10 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Perempuan Di Indonesia

Dr. Andi Yusniar Mendo, S.E., M.M. (Universitas Negeri Gorontalo)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-151-2 (PDF)

